



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN
SUB UNIT KERJA : KECAMATAN TEMANGGUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO BUDI HARTONO
2. Jabatan : CAMAT TEMANGGUNG
3. NHK : 437354

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.489.965.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 5.770 m²/1.000 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 2.520 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 6.665 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 1.500 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 2.558 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 11.230 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 14.850 m² di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 700.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 25.945 m²/2.088 m² di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 975.515.000
9. Tanah Seluas 3.321 m² di TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 1.494.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 247.000.000**

1. MOBIL, CHEVROLET ZAFIRA CD 18 LCD AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI AX125B Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.



6.000.000

3. MOTOR, HONDA NC11B1C A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000

4. MOBIL, GRAND LIVINA 1.5 SV MINIBUS Tahun 2014, HASIL

SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

4.736.965.000

III. HUTANG

Rp.

644.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.092.965.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.